

MASALAH KEPENDUDUKAN DI NEGARA INDONESIA

Sri Rahayu Sanusi, SKM, Mkes.

Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sumatera Utara

1. PENDAHULUAN

Dari hasil sensus penduduk tahun 1990 jumlah penduduk Indonesia adalah 179,4 juta. Berarti Indonesia termasuk negara terbesar ke tiga di antara negara-negara yang sedang berkembang setelah Cina dan India. Dibanding dengan jumlah sensus tahun 1980 maka akan terlihat peningkatan penduduk Indonesia rata-rata 1,98% pertahun. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1995 sebanyak 195,3 juta jiwa.

Bila dilihat dari luas wilayah pada peta penyebaran penduduknya terlihat tidak merata di 27 propinsi. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990 sekitar 60% penduduk tinggal di pulau Jawa, padahal luas pulau Jawa hanya 7% dari luas wilayah Indonesia. Dilain pihak pulau Kalimantan yang luas wilayahnya hanya ditempati oleh 5% dari jumlah penduduknya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Indonesia tidak seimbang. Kondisi tersebut memerlukan upaya pemerataan dan upaya tersebut telah dilaksanakan melalui program transmigrasi dan gerakan kembali ke Desa.

Dilihat dari tingkat pertambahan penduduknya Indonesia masih tergolong tinggi, hal ini bila tidak diupayakan pengendaliannya akan menimbulkan banyak masalah.

Di Indonesia dari tingkat partisipasi anak usia sekolah baru mencapai 53% meskipun wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah dicanangkan oleh pemerintah. Dibanding negara tetangga, tingkat partisipasi pendidikan kita tergolong rendah. Hongkong misalnya tahun 1985 telah mencapai 95%, Korea Selatan 88% dan Singapura telah mencapai 95 % (Surabaya Post, 2 Oktober 1995).

Masalah-masalah lain seperti ketenagakerjaan 77% angkatan kerja masih berpendidikan rendah. Dampaknya terhadap pendapatan perkapita yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kualitas hidup. Juga terhadap kehidupan rumah tangga seperti perceraian dan perkawinan yang akan berpengaruh terhadap angka kelahiran dan kematian yang dalam banyak hal dijadikan indikator bagi kesejahteraan suatu negara.

Nampaknya sederhana, tetapi harus diingat bahwa manusia adalah sebagai subjek tetapi juga sekaligus objek pembangunan sehingga bila tidak diantisipasi mungkin pada gilirannya akan berakibat ketidakstabilan atau kerapuhan suatu negara.

2. MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

A. Masalah Akibat Angka Kelahiran

1. Total Fertility Rate (TFR)

Hasil perkiraan tingkat fertilitas (metode anak kandung) menunjukkan bahwa penurunan tingkat fertilitas Indonesia tetap berlangsung dengan kecepatan yang bertambah seperti nampak pada tabel di bawah ini :

Periode (tahun)	TFR %	Penurunan/tahun
1967 -1970	5,605	1,7
1971 -1975	5,200	2,3
1976 -1979	4,680	2,8
1980 -1984	4,055	3,9
1987 -1990	3,222	2,1

Sumber : BPS Jawa Timur, 1996

Tingkat fertilitas secara keseluruhan dari periode 1981- 1984 ke periode 1986 -1989 turun sebesar 18 % atau sekitar 3,9% pertahun. Namun tingkat penurunan fertilitas mulai melambat antara periode 1986-1989 dan 1987-1990 yaitu menjadi 2,1% rata-rata pertahun.

2. Age Spesific Fertility Rate (ASFR)

Hasil SP71 dan SP80 masih menunjukkan bahwa tingkat kelahiran untuk kelompok umur wanita 20-24 tahun adalah yang tertinggi. Namun demikian terjadi pergeseran ke kelompok umur (25 -29) tahun pada hasil SP80 dan ini akan memberikan dampak terhadap penurunan tingkat fertilitas secara keseluruhan (Trend Fertilitas, Mortalitas dan Demografi, 1994: 18)

Berdasarkan dua kondisi di atas dapatlah disebutkan beberapa masalah (terkait dengan SDM) sebagai berikut :

- 1) Jika fertilitas semakin meningkat maka akan menjadi beban pemerintah dalam hal penyediaan aspek fisik misalnya fasilitas kesehatan ketimbang aspek intelektual.
- 2) Fertilitas meningkat maka pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat tinggi akibatnya bagi suatu negara berkembang akan menunjukkan korelasi negatif dengan tingkat kesejahteraan penduduknya.

Jika ASFR 20- 24 terus meningkat maka akan berdampak kepada investasi SDM yang semakin menurun.

B. Masalah akibat Angka Kematian

Selama hampir 20 tahun terakhir, Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan sebesar 51,0 pada periode 1967-1986. Tahun 1967 AKB adalah 145 per 1000 kelahiran, kemudian turun menjadi 109 per 1000 kelahiran pada tahun 1976. Selama 9 tahun terjadi penurunan sebesar 24,8 persen atau rata-rata 2,8 persen per tahun. Berdasarkan SP90, AKB tahun 1986 diperkirakan sebesar 71 per 1000 kelahiran yang menunjukkan penurunan sebesar 34,9 persen selama 10 tahun terakhir atau 3,5 persen pertahun (Trend Mortalitas, 66).

Tabel Perkiraan Angka Harapan Hidup (AHH)

Tahun	Nilai
SP1971	45,7
SP 1980	52,2
SP 1990	59,8

Sumber: BPS Jatim, 1996.

Sejalan dengan penurunan AKB, AHH menunjukkan kenaikan. Pada tahun 1971 AHH adalah 45,7 yang kemudian naik 6,5 tahun menjadi 52,2 pada SP80 dan mengalami kenaikan 7,6 menjadi 59,8 pada SP90.

Masalah yang muncul akibat tingkat mortalitas adalah :

- 1) Semakin bertambahnya Angka Harapan Hidup itu berarti perlu adanya peran pemerintah di dalam menyediakan fasilitas penampungan.
- 2) Perlunya perhatian keluarga dan pemerintah didalam penyediaan gizi yang memadai bagi anak-anak (Balita).
- 3) Sebaliknya apabila tingkat mortalitas tinggi akan berdampak terhadap reputasi Indonesia dimata dunia.

Pemecahan masalah angka kelahiran dan kematian :

a) Kelahiran

Angka kelahiran perlu ditekan melalui :

- Partisipasi wanita dalam program KB.

- Tingkat pendidikan wanita mempengaruhi umur kawin pertama dan penggunaan kontrasepsi.
- Partisipasi dalam angkatan kerja mempunyai hubungan negatif dengan fertilitas
- Peningkatan ekonomi dan sosial.

b) Kematian

Angka kematian perlu ditekan :

- Pelayanan kesehatan yang lebih baik
- Peningkatan gizi keluarga
- Peningkatan pendidikan (Kesehatan Masyarakat)

C. Masalah Komposisi Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus tahun 1990 berjumlah 179246785 dari jumlah tersebut komposisi usianya tidak berimbang yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru.

Kategori Berdasarkan Usia Sebagai Berikut :

U S I A (Thn)	Jumlah (Jiwa)
0 - 4	20.985.144
5 - 9	23.223.058
10 - 14	21.482.141
15 - 19	18.926.983
20 - 24	16.128.352
25 - 29	15.623.530
30 - 34	13.245.794
35 - 39	11.184.217
40 - 44	8.081.636
45 - 49	7.565.664
50 - 54	6.687.586
55 - 59	4.831.697
60 - 64	4.526.451
65 - 69	2.749.724
70 - 74	2.029.026
>75	4.415

Sumber : Kantor BPS Jawa Timur

Berdasarkan angka-angka tersebut tampak penumpukan jumlah penduduk pada usia muda, yaitu usia 0 -4 tahun berjumlah 20985144 jiwa, usia 5-9 tahun sebesar 23223058 jiwa dan 10 -14 tahun 21428141 jiwa yang mana pada usia tersebut belum produktif masih tergantung pada orang-orang lain terutama keluarga.

Masalah-masalah yang dapat timbul akibat keadaan demikian adalah :

- 1) Aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Banyaknya beban tanggungan yang harus dipenuhi biaya hidupnya oleh sejumlah manusia produktif yang lebih sedikit akan mengurangi pemenuhan kebutuhan ekonomi dan hayat hidup.
- 2) Aspek pemenuhan gizi.
Kemampuan ekonomi yang kurang dapat pula berakibat pada pemenuhan makanan yang dibutuhkan baik jumlah makanan (kuantitatif) sehingga dampak lebih lanjut adalah adanya rawan atau kurang gizi (malnutrition). Pada gilirannya nanti bila kekurangan gizi terutama pada usia muda (0 -5 tahun). Akan mengganggu perkembangan otak bahkan dapat terbelakang mental (mental retardation). Ini berarti mengurangi mutu SDM masa yang akan datang.

3) Aspek Pendidikan

Pendidikan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga diperlukan dukungan kemampuan ekonomi semua termasuk orang tua. Apabila kemampuan ekonomi kurang mendukung maka fasilitas pendidikan juga sukar untuk dipenuhi yang mengakibatkan pada kualitas pendidikan tersebut kurang

4) Lapangan Kerja

Penumpukan jumlah penduduk usia muda atau produktif memerlukan persiapan lapangan kerja masa mendatang yang lebih luas. Hal ini merupakan bom waktu pencari kerja atau penyedia kerja. Apabila tidak dipersiapkan SDMnya dan lapangan kerja akan berdampak lebih buruk pada semua aspek kehidupan.

Alternatif Pemecahan yang diperlukan :

- (a) Pengendalian angka kelahiran melalui KB.
- (b) Peningkatan masa pendidikan.
- (c) Penundaan usia perkawinan

D. Masalah Kependudukan dan Angkatan Kerja.

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun keatas. Mereka terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (BPS : 1994,30). Penduduk yang tergolong angkatan kerja dikenal dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK menurut umur mengikuti pola huruf "U" terbalik. Angkatan rendah pada usia-usia muda karena sekolah, kemudian naik sejalan kenaikan umur sampai mencapai 25 -29 tahun, kemudian turun secara perlahan pada umur-umur berikutnya (antara lain karena pensiun).

Angka kesempatan kerja yang merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja pada tahun 1993 cukup tinggi yaitu sekitar 97,2%. Ini berarti angka pengangguran kurang lebih hanya 2,8 0/00 (BPS: 1994,30).

Berdasarkan hasil sensus tahun 1994 jumlah TPAK sebesar 19.254.554 (Sensus PBS; 1990,417) sedangkan jumlah penduduk mencapai 179.247.283 jiwa sehingga TPAK meskipun mungkin termasuk angkatan kerja. Melihat rasio TPAK dan Non TPAK tampaknya jauh tidak seimbang hal ini kemungkinan dapat menyebabkan masalah antara lain:

- (a) Produktifitas yang dihasilkan oleh sebagian kecil manusia kemungkinan bisa habis dikonsumsi sebagian besar penduduk.
- (b) Pendapatan perkapita akan rendah sehingga berpengaruh pada sektor ekonomi masyarakat.

Alternatif Pemecahan Masalah :

- (a) Penyediaan lapangan kerja
- (b) Peningkatan mutu SDM melalui pendidikan dan keterampilan.

E. Masalah Mobilitas Penduduk di Indonesia

Masalah migrasi penduduk di Indonesia menjadi isu politik kependudukan di Indonesia.

Mobilitas Antar Pulau

Mobilitas antar pulau didominasi mobilitas penduduk di Pulau Jawa. Penduduk yang keluar dari Jawa sebanyak 3,6 juta jiwa tahun 1980 dan 5,3 juta jiwa tahun 1990. Sebagian besar migrasi menuju Sumatera, yaitu 79,75% pada tahun 1980 dan 68,70% pada tahun 1990.

Migran keluar dari Pulau Sumatera tahun 1980 sebanyak 0,8 juta, dan sebesar 92,97% menuju Pulau Jawa, sedang pada tahun 1990 sebesar 1,6 juta dan 92,62 % juga menuju Pulau Jawa. Migran dari Kalimantan sebagian besar menuju

Pulau Jawa. Dari 0,2 juta jiwa pada tahun 1980 ada 73,32% menuju Pulau Jawa dan pada tahun 1990 ada sebanyak 0,5 juta ternyata yang 76,49 % juga menuju Pulau Jawa. (BPS:107,110)

Dapat dimaklumi bahwa Pulau Jawa sebagai tujuan utama para migran, karena di Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian, pusat pendidikan, pusat pemerintahan dan pusat kegiatan sosial ekonomi lainnya. Migran terbesar yang masuk ke Pulau Jawa berasal dari Sumatera, karena Pulau Sumatera secara geografis berdekatan dengan Pulau Jawa dan sistem transportasi yang menghubungkan kedua pulau ini lebih bervariasi dan lebih banyak frekuensinya dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya.

Mobilitas Penduduk antar Pulau Propinsi

Pola mobilitas di Jawa masih sangat besar. Di Jawa Timur jumlah pendatang masih didominasi migran sekitarnya terutama Jawa Tengah. Keadaan ini menunjukkan bahwa perkembangan mobilitas terjadi karena peningkatan peranan lalu lintas di Pulau Jawa dan Sekitarnya termasuk Lampung, Sumatera Selatan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Sedang migran yang keluar dari Jawa Timur mayoritas menuju wilayah Indonesia Barat terutama Sumatera dan daerah pusat pertumbuhan ekonomi seperti Jakarta.

Propinsi pengirim migran total terbesar adalah Jawa Tengah, yaitu 3,1 juta jiwa pada tahun 1980 dan 4,4 juta tahun 1990. Jawa Timur sebanyak 1,6 juta pada tahun 1980 dan 2,5 juta tahun 1990, disusul Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta (BPS 1994; 111).

Mobilitas Penduduk dari Desa ke Kota

Urbanisasi pada dasarnya adalah pertumbuhan penduduk perkotaan yang disebabkan perpindahan dari desa ke kota, dari kota ke kota, serta akibat proses perluasan wilayah perkotaan (Reklamasi).

Permasalahan yang Timbul :

Pertumbuhan penduduk perkotaan selalu menunjukkan peningkatan yang terus menerus, hal ini disebabkan pesatnya perkembangan ekonomi dengan perkembangan industri, pertumbuhan sarana dan prasarana jalan perkotaan.

Upaya Pencegahan:

Pertumbuhan penduduk di perkotaan periode 1971-1980 jauh lebih pesat dibandingkan dengan periode 1980-1990, hal ini disebabkan periode 1971-1980 pertumbuhan ekonomi masih terpusat di daerah perkotaan, sehingga penduduk banyak pindah ke perkotaan untuk memperoleh penghidupan yang lebih layak.

Pada periode 1980-1990 pemerataan pembangunan mulai terasa sampai ke daerah pedesaan. Keadaan ini memungkinkan penduduk tidak lagi membangun daerah perkotaan, akan tetapi cenderung menciptakan lapangan pekerjaan sendiri di pedesaan. (BPS 1994: 18).

Sejalan dengan arah pembangunan yang diharapkan persentase penduduk perkotaan cenderung meningkat. Proyeksi yang diharapkan ada peningkatan dari 31,10 persen tahun 1990 menjadi 41,46 % pada tahun 2000.

Menurut Prigno Tjiptoheriyanto upaya mempercepat proses pengembangan suatu daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan yang disesuaikan dengan harapan dan kemampuan masyarakat setempat. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan jumlah penduduk yang berminat tetap tinggal di desa. Yang perlu diusahakan perubahan status desa itu sendiri, dari desa "desa rural" menjadi "desa urban". Dengan demikian otomatis penduduk yang tinggal di daerahnya menjadi "orang kota" dalam arti statistik (Surabaya Post, 23 September 1996). Guna menekan derasnya arus penduduk dari desa ke kota, maka pola pembangunan yang

beroreantasi pedesaan perlu digalakan dengan memasukan fasilitas perkotaan ke pedesaan, sehingga merangsang kegiatan ekonomi pedesaan.

F. Masalah Kepadatan Penduduk di Indonesia

Dilihat dari jumlah penduduknya Indonesia termasuk negara terbesar ketiga diantara negara-negara sedang berkembang setelah Cina dan India. Hasil pencacahan lengkap sensus penduduk 1990, penduduk Indonesia berjumlah 179,4 juta jiwa. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk pada tahun 1995 mencapai 195,3 juta jiwa.

Kepadatan di 27 Propinsi masih belum merata. Berdasarkan sensus penduduk tahun 1990 sekitar 60% penduduk tinggal di Pulau Jawa, padahal luas Pulau Jawa hanya sekitar 7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia. Dilain pihak, Kalimantan yang memiliki 28% dari luas total, hanya dihuni oleh 5% penduduk Indonesia. Dengan demikian kepadatan penduduk secara regional juga sangat timpang, sementara kepadatan per kilometer persegi di Pulau Jawa mencapai 814 orang, di Maluku dan Irian Jaya hanya 7 orang (BPS, 1994:29).

Permasalahan yang timbul:

Ketidakseimbangan kepadatan penduduk ini mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan baik fisik maupun non fisik yang selanjutnya mengakibatkan keinginan untuk pindah semakin tinggi. Arus perpindahan penduduk biasanya bergerak dari daerah yang agak terkebelakang pembangunannya ke daerah yang lebih maju, sehingga daerah yang sudah padat menjadi semakin padat.

Pemecahan Masalah:

Untuk memecahkan masalah ini dilaksanakan program perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah kekurangan penduduk, yaitu program transmigrasi.

Sasaran utama program transmigrasi semula adalah untuk mengurangi kelebihan penduduk di Pulau Jawa. Tetapi ternyata jumlah penduduk yang berhasil di transmigrasikan keluar Jawa sangat kecil jumlahnya. Pada tahun 1953 direncanakan 100.000 penduduk, tetapi hanya sebanyak 40.000 orang yang berhasil dipindahkan (BPS 1994:90)

Walaupun demikian, program transmigrasi sudah menunjukkan hasilnya dimana penduduk yang tinggal di Pulau Jawa turun dari 60% pada tahun 1990, diproyeksikan menjadi 57,7% pada tahun 2000. Sebaliknya diluar Jawa diproyeksikan akan terjadi kenaikan tahun 1990-2000. Di Pulau Sumatera naik dari 21% pada tahun 1990 menjadi 21,65 % pada tahun 2000 (BPS 1990:6-7).

G. Masalah Perkawinan dan Perceraian

Perkawinan bukan merupakan komponen yang langsung mempengaruhi pertumbuhan penduduk akan tetapi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap fertilitas, karena dengan adanya perkawinan dapat meningkatkan angka kelahiran. Sebaliknya perceraian adalah merupakan penghambat tingkat fertilitas karena dapat menurunkan angka kelahiran.

Di Indonesia status perkawinan (kawin) masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan status perceraian hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

JENIS KELAMIN	KAWIN	CERAI HIDUP/MATI
Pria	25.312.260	1.322.446
Wanita	26.448.577	6.176.904

Sumber: BPS Jawa Timur, 1996

Dari data di atas memberikan gambar bahwa jumlah perkawina baik pria maupun wanita sebesar 5.176.837 masih jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati yang hanya sekitar 7.499.340.

Masalah yang timbul akibat perkawinan antara lain:

1. Perumahan
2. Fasilitas kesehatan

Masalah yang timbul akibat perceraian meningkat adalah :

1. Sosial Ekonomi
2. Nilai agama yang lemah

Alternatif Pemecahan :

Perkawinan

1. Menambah masa lajang.
2. Meningkatkan masa pendidikan.

Perceraian :

1. Konsultasi Keluarga.
2. Pendalaman Agama.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut jumlah penduduknya, Indonesia termasuk negara yang besar dan menduduki urutan terbesar ke tiga di antara negara-negara berkembang setelah Cina dan India.

Menurut hasil sensus penduduk tahun 1990 penduduk Indonesia berjumlah 179,4 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat sekitar 1,98% per tahunnya. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 1995 adalah 195,3 juta jiwa. Dari kondisi semacam ini timbul berbagai masalah kependudukan antara lain: Ketidakmerataan penyebaran penduduk di setiap Propinsi. Di Indonesia berdasarkan SP 1990 kurang lebih 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari luas seluruh wilayah Indonesia. Sebaliknya Kalimantan yang mempunyai luas 28 persen dari seluruh daratan Indonesia hanya dihuni oleh lebih kurang lebih 5% penduduk sehingga secara regional kepadatan penduduk sangatlah timpang.

Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja, tampak masih rendah di mana tingkat pendidikan yang terbanyak adalah SD, yaitu 37,6% dari seluruh penduduk yang bekerja. Hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Pada tahun 1993, dari sekitar 1,2 juta orang yang terdapat sebagai PENCARI KERJA HANYA SEKITAR 328.000 atau 27 % yang memperoleh penempatan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 1994, **Profil Kependudukan Propinsi Jawa Timur**, BPS, Jakarta.
BPS, 1994, **Trend Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi**, BPS, Jakarta.
BPS, 1994, **Proyeksi Penduduk Indonesia Per Kabupaten/Kodya 1990-2000**
BPS, Jakarta
Daldjoeni N, 1986, **Masalah Penduduk dalam Fakta dan Angka**, Alumni Bandung
Goeltenboth, F. 1996, **Applied Geography and Development**, Volume 47 Institute
for Scientific Co-operation, tumbingen Federal Republic of Germany.
Lembaga Demografi, FEU I, 1981, **Dasar-dasar Demografi FEUI**, Jakarta.
Tji Suharyanto, P, **Urbanisasi**, *Surabaya Post*, 23 September 1996.